

Peran Ideologi Pancasila dalam Menangkal Hoaks dan Polarisasi di Media Sosial

Nuha Banun Fariha¹, Nailah Fadhilah², Zaenul Slam³

^{1,2} PIAUD FITK UIN Jakarta Syarif Hidayatullah

¹nuha.banun25@mhs.uinjkt.ac.id,

²nailah.fadhilah25@mhs.uinjkt.ac.id,

³zaenul_slam25@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

The development of social media in the digital era has made it easier for people to access and disseminate information, but it has also created various challenges, such as the spread of hoaxes and social polarization. Hoaxes and polarization in digital spaces have the potential to threaten national unity, reduce the quality of public discourse, and weaken social cohesion. This article aims to analyze the role of Pancasila ideology in countering hoaxes and polarization on social media. The research employs a literature review method by collecting relevant references from scientific journals, articles, and previous studies. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach to examine the relationship between Pancasila values and efforts to create a healthy digital environment. The findings indicate that the values of Pancasila, including honesty, humanity, unity, deliberation, and social justice, can serve as moral foundations for addressing digital challenges. Furthermore, strengthening character education and Pancasila-based digital literacy plays an important role in enhancing people's ability to think critically, verify information, and respect diverse opinions. Therefore, the implementation of Pancasila values can be an effective strategy to combat hoaxes, reduce social polarization, and strengthen national unity in the digital era.

Keywords pancasila; hoaks; polarisasi; media sosial; literasi digital

ABSTRAK

Perkembangan media sosial di era digital telah memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks dan polarisasi sosial. Hoaks dan

polarisasi yang berkembang di ruang digital berpotensi mengancam persatuan bangsa, menurunkan kualitas dialog publik, serta melemahkan kohesi sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ideologi Pancasila dalam menangkal hoaks dan polarisasi di media sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi berupa jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan upaya menciptakan ruang digital yang sehat. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, dapat menjadi landasan moral dalam menghadapi berbagai tantangan digital. Selain itu, penguatan pendidikan karakter dan literasi digital berbasis Pancasila berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta menghargai keberagaman pendapat. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi strategi yang efektif dalam menangkal hoaks, mengurangi polarisasi sosial, dan memperkuat persatuan bangsa di era digital.

Kata Kunci: pancasila; hoaks; polarisasi; media sosial; literasi digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial sebagai sarana memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, dibalik manfaat tersebut, media sosial juga menjadi tempat penyebaran hoaks atau berita palsu yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Penyebaran hoaks sering kali dilakukan secara cepat tanpa adanya proses verifikasi informasi terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat memunculkan perpecahan dan konflik antarkelompok dalam masyarakat. Fenomena polarisasi di media sosial semakin terlihat dalam berbagai isu sosial, politik, maupun budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan akibat perbedaan pandangan dan opini. Keberadaan algoritma media sosial yang menampilkan informasi sesuai minat pengguna seringkali memperkuat sikap fanatisme dan menurunkan sikap toleransi terhadap pendapat yang berbeda. Akibatnya, ruang digital menjadi kurang sehat karena dipenuhi ujaran kebencian, provokasi, dan saling menyalahkan antar pengguna media sosial. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mampu membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan landasan dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas di media sosial. Pancasila mengajarkan masyarakat untuk

menghargai perbedaan pendapat serta menjaga kerukunan antar sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Selain itu, penguatan ideologi Pancasila juga dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih damai dan harmonis. Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat.

Peran ideologi Pancasila dalam menangkal hoaks dan polarisasi di media sosial menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Melalui pendidikan karakter dan literasi digital berbasis Pancasila, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Selain itu, penerapan nilai persatuan dan toleransi dapat membantu mengurangi konflik serta perpecahan yang muncul akibat penyebaran informasi palsu. Dengan demikian,

media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, artikel ini membahas bagaimana peran ideologi Pancasila dalam menangkal hoaks dan polarisasi di media sosial di tengah perkembangan era digital saat ini.

Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, serta ruang diskusi publik. Kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi membuat setiap pengguna berperan sebagai penerima sekaligus penyebar informasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko penyebaran informasi yang tidak akurat dan sulit diverifikasi. Arus informasi yang sangat cepat sering kali menyebabkan masyarakat menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan fakta terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital perlu

diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan mengevaluasi informasi secara kritis (Amelia & Prasiwi, 2026).

Penyebaran hoaks di media sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam kehidupan masyarakat digital. Hoaks dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat, menurunkan kualitas informasi publik, serta memicu kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Rendahnya literasi digital, bias kognitif, serta kecenderungan pengguna untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya menjadi faktor yang mempercepat penyebaran hoaks. Selain itu, algoritma media sosial yang menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna dapat memperkuat terbentuknya ruang gema (echo chamber) sehingga masyarakat semakin sulit menerima perspektif yang berbeda. Akibatnya, masyarakat rentan terjebak dalam informasi yang tidak seimbang dan kurang objektif (Nasution et al., n.d.).

Selain hoaks, fenomena polarisasi sosial juga semakin terlihat dalam berbagai perdebatan yang berlangsung di media sosial.

Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang cenderung hanya berinteraksi dengan individu yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi kurang sehat karena dipenuhi oleh sentimen kelompok, ujaran kebencian, dan sikap intoleran terhadap perbedaan pendapat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kohesi sosial serta mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya digital yang lebih inklusif, toleran, dan berorientasi pada kepentingan Bersama (Rahmawati, 2018).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral dan karakter bangsa. Upaya penanggulangan hoaks dan polarisasi tidak dapat dilakukan hanya melalui regulasi atau pengawasan terhadap media sosial, melainkan juga membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nilai-nilai yang hidup dalam Pancasila dapat menjadi fondasi etis yang

membimbing perilaku masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bermedia sosial, masyarakat diharapkan mampu membangun budaya komunikasi yang santun, kritis, dan berorientasi pada persatuan serta kepentingan bersama (Lutfi et al., 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran ideologi Pancasila dalam menangkal hoaks dan polarisasi di media sosial. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi di era digital. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara nilai-nilai Pancasila, fenomena penyebaran hoaks, polarisasi sosial, serta pentingnya literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, artikel ilmiah, prosiding, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan keterbaruan informasi sehingga mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, memilih, dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan ideologi Pancasila, hoaks, polarisasi sosial, media sosial, serta literasi digital. Selanjutnya, sumber-sumber yang telah diperoleh dibaca secara cermat, dicatat, dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung proses analisis secara mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis)

yang dipadukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti hoaks di media sosial, polarisasi sosial, nilai-nilai Pancasila, serta literasi digital berbasis Pancasila. Setelah itu, data dianalisis dengan membandingkan berbagai temuan dari sumber yang berbeda untuk menemukan keterkaitan antara konsep-konsep yang dibahas. Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan mengenai peran ideologi Pancasila dalam menangkal hoaks dan polarisasi di media sosial.

Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, etika, dan karakter dalam membangun ruang digital yang sehat, kritis, toleran, serta mampu memperkuat persatuan

bangsa di era perkembangan teknologi

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Hoaks dan Polarisasi di Media Sosial

Pada era digital saat ini, media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana utama yang digunakan masyarakat untuk memperoleh, menyebarkan, dan bertukar informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan setiap individu mengakses berbagai informasi secara cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Selain berfungsi sebagai media komunikasi, platform digital juga menjadi ruang publik yang mempertemukan berbagai pandangan, gagasan, dan kepentingan sosial. Namun, perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menimbulkan berbagai persoalan yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena yang semakin terlihat adalah munculnya polarisasi digital yang menyebabkan masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kondisi ini menjadi tantangan serius

karena berpotensi mengganggu persatuan nasional serta melemahkan semangat kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan media sosial perlu dipahami secara kritis agar manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan risiko yang ditimbulkannya (Ema Welan et al., 2025).

Polarisasi digital pada dasarnya dipengaruhi oleh mekanisme algoritma yang digunakan oleh berbagai platform media sosial. Algoritma tersebut dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan minat, kebiasaan, dan preferensi pengguna sehingga mampu meningkatkan keterlibatan mereka dalam menggunakan platform. Akibatnya, pengguna lebih sering menerima informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan yang telah dimiliki sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai echo chamber dan filter bubble, yaitu situasi ketika seseorang hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pemikirannya serta minim interaksi dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam kondisi demikian, ruang diskusi digital

menjadi kurang terbuka terhadap keberagaman opini dan cenderung memperkuat sikap eksklusif kelompok tertentu. Dampak yang muncul adalah semakin maraknya penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Jika tidak diantisipasi dengan baik, keadaan ini dapat memperdalam perpecahan dan menghambat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Di tengah derasnya arus informasi digital, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya di kalangan generasi muda. Perubahan pola komunikasi dan konsumsi informasi membuat media sosial menjadi salah satu sumber utama pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Pada masa sebelumnya, penanaman nilai kebangsaan banyak dilakukan melalui pendidikan formal, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial secara langsung. Namun, saat ini proses tersebut harus bersaing dengan berbagai konten digital yang lebih cepat, menarik, dan mudah menarik perhatian pengguna. Tidak sedikit konten yang beredar lebih mengutamakan sensasi dan emosi

dibandingkan substansi pendidikan karakter serta penguatan nilai kebangsaan. Akibatnya, pemahaman terhadap Pancasila sering kali menjadi dangkal dan terbatas pada aspek simbolis semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai-nilai Pancasila memerlukan pendekatan baru yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan budaya digital (Mujahidah & Dewi, 2022).

Selain mempengaruhi pemahaman terhadap nilai kebangsaan, polarisasi digital juga berdampak pada menurunnya kualitas interaksi sosial di ruang publik. Perbedaan pandangan yang sebenarnya merupakan hal wajar dalam masyarakat demokratis seringkali berkembang menjadi pertentangan yang bersifat emosional dan tidak produktif. Masyarakat cenderung mengelompok berdasarkan kesamaan identitas politik, agama, maupun latar belakang sosial tertentu sehingga ruang dialog menjadi semakin sempit. Akibatnya, budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan mulai mengalami penurunan. Situasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi

toleransi, persatuan, musyawarah, dan semangat gotong royong. Fragmentasi sosial yang terus berkembang berpotensi melemahkan kohesi sosial serta mengurangi rasa solidaritas antar sesama warga negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan berkeadilan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila di ruang digital menjadi langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Pancasila perlu dihadirkan sebagai pedoman etika dalam menggunakan media sosial dan berinteraksi di dunia maya. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial harus diwujudkan dalam perilaku digital yang bertanggung jawab dan menghargai keberagaman. Upaya tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, komunitas masyarakat, dan penyedia platform digital. Selain itu, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila perlu terus dikembangkan agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun provokasi.

Dengan adanya kesadaran kolektif untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung persatuan dan memperkuat integrasi nasional. Melalui langkah tersebut, tantangan polarisasi digital dapat diminimalkan sehingga tercipta ruang publik yang lebih sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama (Info, 2024).

Peran Pancasila dalam Menangkal Hoaks

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital, termasuk maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Hoaks merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan sengaja disebar untuk menyesatkan masyarakat atau mempengaruhi opini publik. Keberadaan hoaks dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti munculnya kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman moral dan etika yang dapat membimbing masyarakat

dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan landasan dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Melalui pengamalan nilai-nilai tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penyebaran hoaks dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih sehat dan kondusif (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2025).

Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Dalam konteks penggunaan media sosial, nilai tersebut dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Seseorang yang memahami ajaran moral dan etika keagamaan akan lebih berhati-hati sebelum membagikan suatu informasi kepada orang lain. Selain itu, nilai ketuhanan juga mendorong individu untuk menghindari perilaku yang dapat merugikan sesama, termasuk menyebarkan berita bohong yang

berpotensi menimbulkan keresahan. Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi moral dapat menjadi pengendali dalam aktivitas bermedia sosial. Oleh karena itu, sila pertama berperan penting dalam membangun karakter masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Penerapan nilai ini dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks yang sering kali muncul akibat kurangnya kesadaran etis pengguna media sosial (Hidayah et al., 2022).

Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak setiap individu. Penyebaran hoaks sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu karena dapat merusak reputasi, menimbulkan fitnah, atau memicu diskriminasi. Dengan mengamalkan nilai kemanusiaan, masyarakat akan lebih mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan sebelum menyebarkan suatu informasi. Sikap empati dan kepedulian terhadap sesama menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran berita palsu yang dapat menyakiti orang lain. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mengedepankan sikap santun

dan beradab dalam berkomunikasi di ruang digital. Nilai kemanusiaan mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai dengan tanggung jawab sosial agar tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, penerapan sila kedua dapat menciptakan budaya komunikasi yang lebih sehat dan menghargai kebenaran (Paus Yohanes Paulus II, 1993).

Peran Pancasila dalam menangkal hoaks juga tercermin melalui sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hoaks sering kali digunakan untuk memecah belah masyarakat melalui isu-isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Informasi yang bersifat provokatif dapat memunculkan rasa curiga, kebencian, dan konflik antarkelompok apabila diterima tanpa proses verifikasi yang memadai. Nilai persatuan mengajarkan masyarakat untuk selalu menjaga keharmonisan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu. Dengan berpegang pada semangat persatuan, masyarakat akan lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi yang berpotensi memicu perpecahan.

Selain itu, masyarakat juga terdorong untuk membangun dialog yang positif dan menghargai keberagaman pendapat dalam ruang digital. Oleh karena itu, sila ketiga menjadi landasan penting dalam menjaga integrasi sosial di tengah deras arus informasi digital.

Sementara itu, sila keempat dan sila kelima memberikan pedoman dalam membangun budaya literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, serta kemampuan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Dalam menghadapi informasi di media sosial, masyarakat perlu melakukan verifikasi dan analisis terhadap sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Adapun sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial yang dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat yang mengamalkan nilai keadilan akan berusaha menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari informasi menyesatkan. Dengan demikian, seluruh sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang

kuat dalam membentuk karakter masyarakat yang bijak dalam bermedia sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menangkal hoaks sekaligus menjaga persatuan bangsa di era digital (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2025).

Pancasila sebagai Upaya Mengatasi Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial merupakan salah satu tantangan yang semakin nyata di era digital akibat meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan, keyakinan, atau identitas yang berbeda dan cenderung sulit menerima perspektif dari kelompok lain. Kondisi ini sering diperparah oleh penyebaran informasi yang bersifat provokatif, hoaks, serta narasi yang memicu sentimen kelompok. Akibatnya, perbedaan yang seharusnya menjadi bagian dari keberagaman justru berkembang menjadi sumber konflik sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, polarisasi sosial dapat mengancam persatuan serta melemahkan kohesi sosial

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan nilai yang mampu menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai bentuk polarisasi yang berkembang di ruang digital maupun kehidupan nyata (Nurul Hidayat, 2025).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap individu tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun pandangan politik. Dalam kehidupan digital, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap menghargai pendapat orang lain dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan diskriminasi atau kebencian. Masyarakat yang mengamalkan nilai kemanusiaan akan lebih mengedepankan empati dan dialog dibandingkan permusuhan ketika menghadapi perbedaan pandangan. Sikap tersebut sangat penting untuk mencegah munculnya konflik yang

disebabkan oleh kesalahpahaman atau fanatisme kelompok. Selain itu, nilai kemanusiaan juga mendorong terciptanya interaksi sosial yang lebih beradab dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan sila kedua dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi ketegangan sosial yang muncul akibat polarisasi (MAGARETA et al., 2022).

Peran Pancasila dalam mengatasi polarisasi sosial juga terlihat melalui implementasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam realitas kehidupan digital, masyarakat seringkali dihadapkan pada berbagai informasi yang berpotensi memecah belah persatuan, terutama yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Apabila nilai persatuan tertanam dengan kuat, masyarakat akan lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik sosial. Mereka juga akan lebih mengutamakan semangat kebersamaan serta mencari titik temu di tengah perbedaan yang ada. Kesadaran bahwa keberagaman

merupakan kekayaan bangsa dapat memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar sesama warga negara. Oleh karena itu, sila ketiga memiliki peran penting dalam menjaga integrasi nasional di tengah berkembangnya polarisasi sosial pada era digital (Victorio et al., 2025).

Selain melalui penguatan nilai persatuan, upaya mengatasi polarisasi sosial juga dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan sejak usia dini sehingga individu memiliki kemampuan untuk bersikap bijak dalam kehidupan sosial. Di era digital, pendidikan karakter menjadi semakin penting karena generasi muda menghadapi berbagai pengaruh dari media sosial yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter, peserta didik dapat dibentuk menjadi individu yang toleran, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, pendidikan Pancasila juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Generasi muda yang memiliki

pemahaman kuat terhadap nilai-nilai Pancasila akan lebih mampu menghadapi berbagai informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2025).

Di samping pendidikan karakter, peningkatan literasi digital juga merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk mengurangi polarisasi sosial di masyarakat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang baik akan lebih mampu membedakan informasi yang valid dengan informasi yang bersifat manipulatif atau menyesatkan. Kemampuan tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan narasi provokatif yang sering menjadi pemicu polarisasi sosial. Selain itu, literasi digital juga membantu masyarakat memahami

pentingnya etika komunikasi dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Jika literasi digital dipadukan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, masyarakat akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga persatuan serta menghargai keberagaman. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan karakter dan literasi digital menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi polarisasi sosial dan memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat.

Pentingnya Literasi Digital Berbasis Pancasila

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Media sosial kini menjadi salah satu sumber utama informasi yang digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudahan akses terhadap informasi memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Arus informasi yang sangat cepat sering kali membuat masyarakat menerima dan

membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan memahami dan menilai kualitas informasi secara kritis. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Literasi digital memungkinkan masyarakat untuk menggunakan media digital secara cerdas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Literasi digital pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui media digital. Kemampuan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai informasi yang diterima. Di era digital, masyarakat dihadapkan pada berbagai informasi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu,

kemampuan memverifikasi sumber informasi dan membedakan fakta dengan opini menjadi bagian penting dari literasi digital. Individu yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih berhati-hati sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi kepada orang lain. Selain itu, mereka juga mampu memahami dampak sosial yang dapat ditimbulkan dari aktivitas mereka di ruang digital. Dengan demikian, literasi digital berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Dalam upaya membangun budaya digital yang sehat, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan literasi digital. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang relevan dengan berbagai tantangan yang muncul di era digital, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Sila pertama mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi kebenaran dan menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sila kedua mendorong masyarakat untuk menghormati hak

dan martabat orang lain dalam setiap bentuk komunikasi digital. Sementara itu, sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan bangsa dengan tidak menyebarkan konten yang dapat memicu konflik atau perpecahan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman penting dalam membentuk perilaku digital yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan beradab.

Penerapan literasi digital berbasis Pancasila juga berperan penting dalam menumbuhkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman pendapat di media sosial. Ruang digital saat ini menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, agama, suku, dan pandangan politik yang berbeda. Perbedaan tersebut sering kali memunculkan perdebatan yang berpotensi berkembang menjadi konflik apabila tidak disikapi secara bijak. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat belajar untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa

Indonesia. Sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain dapat membantu menciptakan dialog yang lebih konstruktif di ruang digital. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mampu mengendalikan emosi serta menghindari tindakan yang dapat memicu permusuhan dan polarisasi sosial. Dengan demikian, literasi digital berbasis Pancasila tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis masyarakat, tetapi juga memperkuat karakter kebangsaan dalam kehidupan digital.

Lebih jauh lagi, literasi digital berbasis Pancasila memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, damai, dan harmonis. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam melawan penyebaran hoax, disinformasi, dan berbagai bentuk konten negatif lainnya. Semangat persatuan juga dapat memperkuat kesadaran bahwa media sosial seharusnya digunakan untuk mempererat hubungan sosial, bukan memperuncing perbedaan yang ada. Selain itu, nilai keadilan sosial mendorong terciptanya ruang digital yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk

menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten dalam aktivitas digital, maka media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung pembangunan karakter dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan literasi digital berbasis Pancasila perlu terus dikembangkan melalui pendidikan, keluarga, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan langkah tersebut, masyarakat akan mampu menghadapi tantangan era digital secara lebih bijak sekaligus menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi global.

E. Kesimpulan

Perkembangan media sosial di era digital telah membawa berbagai kemudahan dalam proses komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, dibalik manfaat tersebut muncul berbagai tantangan, seperti penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Polarisasi yang terjadi di ruang digital dapat mengurangi kualitas dialog publik dan melemahkan kohesi sosial

masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang mampu mengarahkan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting dalam menangkal hoaks serta mengatasi polarisasi sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengajarkan pentingnya kejujuran, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Selain itu, Pancasila juga mendorong terciptanya sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman pendapat sehingga konflik sosial dapat diminimalkan. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang relevan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital.

Penguatan literasi digital berbasis Pancasila merupakan langkah strategis dalam membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Literasi digital membantu masyarakat untuk mampu memverifikasi informasi, berpikir kritis, serta memahami etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi digital, masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai bentuk hoax dan provokasi yang beredar di media sosial. Selain itu, nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi dapat menjadi benteng dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan nilai-nilai Pancasila dan literasi digital perlu terus dikembangkan guna menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ihsan Khoirul Anam, Hesti Arlinda Natasya, & Rizquna Salsabila. (2025). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Hukum,*

Politik Dan Ilmu Sosial, 4(1), 163–174.

<https://doi.org/10.55606/jhps.v4i1.5063>

Amelia, M., & Prasiwi, B. (2026). *Peran literasi digital dalam mencegah disinformasi dan hoaks di media sosial: upaya membangun masyarakat yang kritis dan cerdas*. 4, 1191–1197.

Ema Welan etal, A., Ema Welan, A., Kampas, E., Pamulang, U., Raya Puspitek, J., Pamulang, K., Tangerang Selatan, K., Banten, P., & Pos, K. (2025). Tantangan Ideologi Pancasila Di Era Media Sosial: Analisis Pengaruh Polarisasi Digital terhadap Persatuan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 3(2), 146–157.

Hidayah, Y., Simatupang, E., Belladonna, A. P., Colombo, J., No, Y., Malang, K., & Istimewa, D. (2022). Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konsep Etika. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 208–215.

Info, A. (2024). *Implementasi Pancasila di era digitalisasi Safari Nurliana 1 , Achmad Akmaludin 2*. 1–5.

- Lutfi, M. F. R., Maramis, C., Rahmadani, Z. D., Aditina, N. F., Rahmadini, M., Hanif, I. L., & Mansur, A. P. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Menangkal Polarisasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 36414–36420.
- MAGARETA, C. A. S., PUSPITA, C., PERMONO, Y. A., & FITRIONO, R. A. (2022). Penerapan Pancasila Dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(4), 13–18.
- Mujahidah, I., & Dewi, D. A. (2022). Internalisasi Nilai Pancasila Terhadap Generasi Muda Sebagai Wujud Mempertahankan Budaya Bangsa. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 431. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54773>
- Nasution, D. A., Rizky, M. C., Anggraeini, F. A., Surbakti, F. Y., Harefa, D. A., & Ramadan, F. (n.d.). *Critical Thinking di Era Distorsi Informasi : Membedah*.
- Nurul Hidayat. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Paus Yohanes Paulus II. (1993). *Veritatis Splendor (Cahaya Kebenaran)*. 156.
- Rahmawati, D. (2018). Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial: Kajian Terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 33(Maret), 37–49.
- Victorio, W., Tumanggor, R. O., Maharani, B., Pasya, N. I., Angel, G., & Pangestu, Y. (2025). Penerapan Nilai Kerakyatan Pancasila dalam Menangkal Polarisasi Opini di Media Sosial. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 581–586. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3432>